

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tahun 2025 telah tercapai dengan beberapa point yang sesuai target maupun yang mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT disusun dan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2025. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik dengan unit kerja di lingkungan Setda provinsi Nusa Tenggara Timur sangat diperlukan agar seluruh target kinerja yang diperjanjikan dapat dicapai. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT pada tahun-tahun mendatang.

Kupang 22 Januari 2025

Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Alexander B. Koroh, MPM
NIP 197004271990031005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	..i
DAFTAR ISI	..ii
BAB 1 Pendahuluan	..8
1.1. Latar Belakang	..8
1.2. Maksud dan Tujuan	..9
1.3. Dasar Pelaksanaan	9
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja	11
2.1. Perencanaan Kinerja	11
2.2. Program dan Kegiatan	11
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	12
2.4. Anggaran Belanja Biro Perekonomian dan Admnistrasi Pembangunan	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	27
3.1. Pengukuran Kinerja	28
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.3. Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV Kepegawaian	57
4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan hal	57
BAB V Pengumpulan Data SKM	86
5.1 Pelaksana SKM	86
5.2 Metode Pengumpulan Data	86
5.3 Lokasi Pengumpulan Data	87
5.4 Waktu Pelaksanaan SKM	87
5.5 Jumlah Responden	87
BAB VI	93
PENUTUP	93

CAPAIAN KINERJA
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2024

A. UMUM

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT ditetapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sekretariat Daerah Provinsi NTT merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi NTT dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor nomor 1 tahun 2022 di atas, maka Sekretaris Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah **“Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan”**.

Fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
2. Penyiapanan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta pengadministrasian pembangunan;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi-fungsi kegiatan mencakupi berbagai bidang/sector pembangunan di antaranya adalah:

- (1) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian meliputi pengelolaan kebijakan ekonomi Makro dan pengelolaan kebijakan ekonomi mikro.
- (2) Pengelolaan Kebijakan Sumber Daya Alam meliputi: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
- (3) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD meliputi: Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik daerah, jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD.

- (4) Pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan daerah meliputi: Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, Pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan APBN, Pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah.
- (5) Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi: Analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT berpegang pada Moto lembaga yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk mendukung visi Gubernur: “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berada pada Misi V, yaitu: mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia Yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif(BERKELANJUTAN) berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan
2. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD dan Administrasi Pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pembangunan daerah (APBD) dan administrasi pembangunan wilayah (APBN), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tertib, cepat dan tepat

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.
2. Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.
3. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administrasi pembangunan yang tertib.

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah: meningkatkan Penegakan otoritas fungsional pemerintah, sebagai OPD yang melaksanakan fungsi Penunjang Program, melalui: Identifikasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, *High Level Meeting*, Konsultasi, konsolidasi, Monitoring, Evaluasi, Validasi, *Focuss Group Discussion*,

Pembinaan berjenjang, Analisis dan penyusunan pelaporan/ rekomendasi. dengan Indikator sasaran:

1. Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik, yaitu kebijakan ekonomi makro- mikro dan SDA
2. Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik
3. Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Koordinasi pengendalian Inflasi Daerah
2. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi pengendalian BBM bersubsidi
3. Memfasilitasi peningkatan daya saing dan akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM dan peningkatan akses calon debitur KUR ke dalam SIKP
4. Fasilitasi Percepatan Akses inklusi dan literasi Keuangan Daerah (TPAKD)
5. Menyelenggarakan kegiatan identifikasi sentra komoditi unggulan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan pengelolaan produksi dan produktifitas komoditi unggulan pertanian, peternakan, kelautan perikanan dan kehutanan (HHBK) di Kab/kota se NTT.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan monitoring terkait potensi pengembangan EBT dan Sumber Daya Air.
7. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tatakelola BUMD/BLUD milik pemerintah daerah.
8. Menginisiasi pembentukan lembaga ekonomi / badan usaha ekonomi daerah baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas sesuai kebutuhan.
9. Menginisiasi pembentukan regulasi atau aturan hukum (Pergub / Perda) tentang BUMD.
10. Menyelenggarakan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD dan APBN).
11. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Wilayah (APBD dan APBN).

Program dan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sesuai dengan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dijabarkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Adalah Sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - 2.1 Pengelolaan Kordinasi Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro dan Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, kehutanan, peternakan, dan kelautan)

2.2Pengelolaan koordinasi fasilitasi kebijakan pembinaan pendirian BUMD dan
BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.Program Adminsitration Pembangunan

3.1Peningkatan kinerja pengendalian administrasi dan pelaporan pembangunan
daerah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.360.215.040.-** mengalami Pengurangan anggaran pada perubahan pertama **Rp. 1.799.976** dan Mengalami Penambahan Anggaran pada Perubahan ke dua sebesar **Rp. 200.000.000.-** dan Total Anggaran akhir **Rp. 1.558.415.064.-** dengan realisasi fisik sebesar **87,57 %**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024 berisi laporan pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan tupoksi yang diembannya, maka pada tahun 2024 ini Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kerjanya masing-masing sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024. Realisasi dari masing-masing indikator dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik. Target 100 % realisasi 100%,
2. Indikator Kinerja : Cakupan kebijakan pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik. Target 100 % realisasi 100%,
3. Indikator Kinerja : Prosentase BUMD yang memiliki kinerja baik. Target 75 %, Realisasi 75 % dimana pada tahun 2024 ada 3 (Tiga) BUMD yang berkinerja baik. Dan menghasilkan 3 Dokumen
4. Indikator Kinerja : Efektifitas peningkatan kinerja administrasi Pembangunan dengan target 100 % dan 8 laporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas realisasi 100% dan menghasilkan 13 laporan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator kinerja dan realisasi Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur nampak seluruh indikator yang direncanakan berhasil dicapai dengan optimal sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari Kepala Biro, pejabat Fungsional Analis Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Analis Ahli Muda Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan seluruh staf pelaksana dilingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatunya itu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan stratejik memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari upaya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKIP.

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu pintu dan kemudahan perolehan informasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi baik kondisi internal maupun eksternal. Tersusunnya LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan:

- (1) Meningkatkan kualitas Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;

- (2) Meningkatkan komitmen dan kerjasama antara Inspektorat, Bappelitbangda, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT maupun seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terjalin kerjasama sesuai manajemen kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja; dan
- (3) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, benar dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Maksud :

Untuk memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan Rencana Strategik (Renstra) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab.

2. Tujuan :

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3 Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Laporan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2024 s.d 2026 di dasarkan atas visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Visi

NTT Bangkit Menuju Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Misi

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; dan
 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Tugas pokok Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengekoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Administrasi Pembangunan.

2.2 Program dan Kegiatan

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut diatas, pada tahun anggaran 2024 telah disusun program dan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

❖ **Program Perekonomian dan Pembangunan**

- ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ;
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

❖ **Program Administrasi Pembangunan:**

- ✓ Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- ✓ Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelola.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ; dan
5. Sebagai dasar pemberi reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD 2024 s.d 2026 yang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik.
3. Terwujudnya tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
	2	3	4	5	6
	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro)	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro Mikro yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro Mikro yang terkonsolidasi}} \times 100$
		Persentase cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi dengan baik	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi SDA terkonsolidasi yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi}} \times 100$
	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD	75%	100 %	$\frac{\text{Jumlah Cakupan Pembinaan,koordinasi Fasilitasi BUMD,BLUD yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Cakupan Pembinaan Koordinasi,Fasilitasi BUMD}} \times 100$

	dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik			dan BLUD yg terkonsolidasi
	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administrasi pembangunan yang tertib	Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib	100%	100%	Jumlah Cakupan Koordinasi,monev AP Daerah dan AP Wilayah yg diselesaikan -----x 100 Jumlah Cakupan Koordinasi,monev AP Daerah dan AP Wilayah

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja(Program)	Rp. 1.360.215.040,-	Realisasi minimal 85%
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 385.279.616,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 759.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 215.935.424,-	Realisasi minimal 85%

	4.		
	b) Pendapatan	Rp. -	-
	Jumlah Belanja (APBD)	Rp 1.360.215.040,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi		
	1. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 230.451.000.-	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan		
	1. -		
	Jumlah Dekonsentrasi	Rp. 230.451.000.-	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2024;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;
 - I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2024;
 - J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
 - K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
 - L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah

Indikator Kinerja dari setiap sasaran strategis di bagi dalam 2 (dua) Program yang dijelaskan sebagai berikut :

1. **Capaian dari Program Perekonomian dan Pembangunan adalah:** Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan BUMD/BLUD. Program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator Kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun 3 (tiga) kegiatan yang di laksanakan dalam program Perekonomian dan Pembangunan yaitu:

a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Keluaran	:	Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian Makro dan Mikro	
Hasil	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Secara Optimal.	
Indikator/ Target	:	1.Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (Rapat Teknis, High Level Meeting, Rapat Koordinasi Kabupaten, Monev Daerah IHK dan Pengendalian Inflasi Daerah, Sidak Pasar, Rakornas, Konsultasi Ke Jakarta Pengendalian Inflasi) Lokasi Monev : (Rapat Teknis : Kab.TTS) lokasi HLM Kota Kupang, RAKOR lokasi : Kab. Alor dan Kab. Malaka, Monev IHK Lokasi : Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, dan Kab. TTS Monev Pengendalian Inflasi Daerah : Kab. Ende, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat	64 Dok 7 Rek
		2.Jumlah Dokumen dan hasil koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR kegiatan Rakor : Lokasi kota Kupang Lokasi Monev : Kab. Alor, Kab. TTU, dan Kab. Malaka.	2 Dok 1 Rek
		3.Jumlah Dokumen Hasil, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT	1Dok

		Konsultasi ke Jakarta tentang Penyaluran BBM, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Monev penyaluran BBM Lokasi : Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka	
--	--	--	--

b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Keluaran	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
Hasil	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
Indikator / Target	:	1. Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok. Kota kupang dan Kab. TTS	1 Dok
		2. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA (lok. Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, Kab Ende, Ngada , Malaka,	1 Dok
		3. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air Lokasi Kab, Kab Malaka, TTS , TTU ,Sumba Barat Daya	1 Dok

c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Keluaran	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
Hasil	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
Indikator / Target	:	1. Jumlah Notulen Hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1x Rapat Audiens terkait temuan PT.	1 Notulen

	Fobamor bersama dengan BPK RI Menghasilkan 1 Notulen	
	2. Jumlah Dokumen dalam rangka monitoring penerapan SK Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum PERUMDA/PDAM di Kab/Kota Se -Prov NTT Lok Kab Flotim, Kab Sumba Timur, Kab. Sikka Kab.Rote Ndao, Kab.TTS, Kab. Ngada dan Kab. Belu	1 Dok
	3. Jumlah SK Hasil Rapat Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	SK Gubernur Dalam proses TTD Pimpinan
	4. Jumlah Dokumen Rapat koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lokasi :Kab. Manggarai , Kab. Lembata, Kab. Alor	1 dokumen
	5. Penyusunan perda Penyertaan Modal pada PT BPD NTT	Naskah Akademik dan Perda Penyertaan Modal
	6. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Lembata Tanggal 29 April 2024, Flores Timur Tanggal 2 Mei 2024, Sumba Tengah Tanggal 3 September 2024, Sumba Barat Daya Tanggal 5 September 2024, Kabupaten Alor Tanggal 14 November 2024)	5 Dok

2. Program Administrasi Pembangunan

Capaian dari Program ini yaitu: Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan

Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator kinerja dari kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun 1 (satu) kegiatan yang di laksanakan dalam program Administrasi Pembangunan yaitu :

a. **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Keluaran	:	Terlaksananya program Administrasi Pembangunan	
Hasil	:	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
Indikator / Target	:	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD) Rapat dilaksanakan 4x dalam setahun dengan Lokasi, Kota Kupang.	4 Dok
	:	2. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi, Kota Kupang	2 Dok
	:	3. Jumlah Laporan Paket Sebaran Kegiatan APBD	1 Dok
	:	4. Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan daerah di Kab/Kota (APBN) lokasi, Kab. Kupang, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Manggarai (APBD) Kab. Malaka, Kab. Belu, Kab. Saburajua, Kab. Nagakeo, Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao.	2 Dok
	:	5. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah yang dilaksanakan 2x dalam setahun dengan lokasi, Kota Kupang dan Kab. TTS.	1 Dok
	:	6. Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah	13 Dok
	:	7. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Wilayah	1 Dok

Mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan maka kegiatan untuk mendukung sasaran strategis secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan 1	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro

		2. Fasiltasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		Besar anggaran yang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 408.000.000,-
Kegiatan 2	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp109.100.000 ,-
Kegiatan 3	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha. 2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi. 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan dan pengelolaan BLUD 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan dan pendirian BLUD
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.442.500.000,-
Kegiatan 4	:	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 213.735.424.-

2.4 Anggaran Belanja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dalam Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan anggaran di setiap SKPD. Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah 3 (tiga) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan.

Komposisi Anggaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024

No	Program/ Kegiatan	DPA Murni	Perubahan
----	-------------------	-----------	-----------

			Penambahan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	385.079.640.-	1.799.976	385.079.640.-
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	759.600.000.-	200.000.000.-	959.600.000.-
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	213.735.424.-	201.799.976	187.160.000.-
	Total	1.358.415.064.- -	201.799.976	1.558.415.064.-

Komposisi Anggaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu (Rp.)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.139.000	-	49.139.000
		2. Administrasi Umum PD	1. Penyediaan Barang	161.568.000	-	161.568.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu (Rp.)
			Cetakan dan Penggandaan 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3. Penyediaan Bahan/Material 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.585.040		100.585.040
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	73.787.600.-	-	73.787.600.-
2	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	408.000.000	-	408.000.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu (Rp.)
		2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	69.100.000	-	69.100.000
			Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000	-	40.000.000
		3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pendirian BUMD	156.000.000	200.000.000	356.000.000
			4. Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pendirian BLUD	86.500.000	-	86.500.000
3	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99.000.000	-	99.000.000
			6. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.660.000	-	39.660.000
			7. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah	48.500.000	-	48.500.000
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	26.575.424	-	26.575.424

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu (Rp.)
JUMLAH				1.258.415.064.-	200.00.000.-	1.558.415.064.-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *actuating* sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai sistem perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja untuk mengukur sasaran.

LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- c. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal *outputs* dari kegiatan

yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $75\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 75\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, maka dapat dijelaskan sasaran strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas koordinasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam	Presentase kebijakan substansi Makro Mikro dan SDA perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100%	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
2	Meningkatnya pembinaan , monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen	Persentase cakupan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100%	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3	Meningkatnya koordinasi, monitoring, dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administrasi yang tertib	Persentase Perangkat Daerah Tertib Administrasi pembangunan Daerah dan Administrasi Pembangunan Wilayah	100%	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Sasaran Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

tahun 2024 sesuai taret keberhasilan yang dapat diuraikan dalam table sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN(%)		KEBERHASILAN
1	2	3		5	6	7	8
1	Terlaksanannya koordinasi pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	100	100	100%		Hasil pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (Rapat Teknis, High Level Meeting, Rapat Koordinasi Kabupaten, Monev Daerah IHK dan Pengendalian Inflasi Daerah, Sidak Pasar, Rakornas, Konsultasi Ke Jakarta Pengendalian Inflasi) Lokasi Monev : (Rapat Teknis : Kab.TTS) lokasi HLM Kota Kupang, RAKOR lokasi : Kab. Alor dan Kab. Malaka, Monev IHK Lokasi : Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, dan Kab. TTS Monev Pengendalian Inflasi Daerah : Kab. Ende, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat

							Hasil koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR
							Evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT Konsultasi ke Jakarta tentang Penyaluran BBM, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100	100	100%		Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok. Kota kupang dan Kab. TTS
							Hasil Monotoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA lok. Kab. Kupang, Sumba Barat Daya Kab Ende, Ngada , Malaka,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN(%)		KEBERHASILAN
1	2	3		5	6	7	8

							Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air Lokasi Kab, Kab Malaka, TTS , TTU ,Sumba Barat Daya
2	Terlaksananya koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%	75%	75%		Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1x Rapat Audiens terkait temuan PT. Fobamor bersama dengan BPK RI Menghasilkan 1 Notulen
							monitoring penerapan SK Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum PERUMDA/PDAM di Kab/Kota Se -Prov NTT Lok Kab Flotim, Kab Sumba Timur, Kab. Sikka Kab.Rote Ndao, Kab.TTS, Kab. Ngada dan Kab. Belu
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Penyusunan perda Penyertaan Modal pada PT BPD NTT Rapat koordinasi, sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BUMD Keuangan dan Aneka Usaha dengan Lokasi : Kab. Maggarai, Kab. Lembata, dan Kb. Alor Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan

							Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Lembata Tanggal 29 April 2024, Flores Timur Tanggal 2 Mei 2024, Sumba Tengah Tanggal 3 September 2024, Sumba Barat Daya Tanggal 5 September 2024, Kabupaten Alor Tanggal 14 November 2024
--	--	--	--	--	--	--	---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	KEBERHASILAN
1	2	3		5	6	
3	Terwujudnya Tatakelola Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se-NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan Daerah Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	100% 100	100% 100	100% 100%	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD) Rapat dilaksanakan 4x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang. -Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang -Laporan Paket Sebaran Kegiatan APBD -Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan daerah di Kab/Kota (APBN) lokasi, Kab. Kupang, Kab. Ngada,Kab. Sikka,Kab. TTS, Kab. TTU,Kab. Belu, Kab. Manggarai (APBD) Kab.Malaka,Kab. Belu, Kab. Saburaijua, Kab .Nagakeo, Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab TTS Kab. TTU, Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao. dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang -Laporan Paket Sebaran Kegiatan APBD -Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan daerah di Kab/Kota (APBN) lokasi, Kab. Kupang, Kab. Ngada,Kab. Sikka,Kab.

							TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Manggarai (APBD) Kab. Malaka, Kab. Belu, Kab. Saburajua, Kab .Nagakeo, Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab TTS Kab. TTU, Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao.
--	--	--	--	--	--	--	--

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Administrasi Pembangunan. Adapun kegiatan – kegiatan yang mendukung dengan permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan kedua program tersebut adalah sebagai berikut:

- **Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan :**
 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.**

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
1	1. Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	
	2. Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	3. Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, evaluasi dalam rangka	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	pengendalian BBM bersubsidi di NTT			pelaksanaan kegiatan		

b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
2	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok Kota Kupang dan Kab.TTS	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Madu di Kec. Mutis	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target -
	3. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target -
	4. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kendala ketersediaan anggaran	Pengajuan kegiatan harus lebih awal	Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	Upaya Peningkatan Elektrifikasi Daerah			dengan waktu pelaksanaan kegiatan	dari waktu pelaksanaan	
	5. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Alam	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target -

c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
1.	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1 kali) Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Prov menghasilkan 1 Dok	100	100	1. Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan 2. Karena berakhirnya masa jabatan pengelola BUMD serta memfasilitasi seleksi Direksi PT. Flobamor dan PT. Kawasan Industri Bolok serta Pelantikan Direksi dari kedua BUMD tersebut dilaksanakan pada Bulan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	100

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
2.				Desember Tahun 2024 .		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pembinaan BUMD Prov NTT (PT.BPD NTT,PT.Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok)	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
4.	Jumlah SK Hasil Rapat Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum	1 SK Gubernur	1 SK Gubernur	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK Gubernur Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda /PDAM di Kab/Kota Se- Provinsi NTT	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target -
	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari	Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	Evaluasi Kebijakan pengelolaan BLUD.			pelaksanaan kegiatan	waktu pelaksanaan	
5.	Jumlah Dokumen Hasil Monev Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI Terkait Kebijakan Pendirian BLUD di Prov.NTT	1 Dok	1 Dok	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
6.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.	1 Dok	1 Dok	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
7.	Jumlah Dokumen Hasil Monev Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait kebijakan pendirian BLUD di Prov NTT	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target

- **Program Administrasi dan Pembangunan**

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
8	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi	100	100	Kendala ketersediaan anggaran	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari	Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	Pelaksanaan Pembangunan (APBD)			dengan waktu pelaksanaan kegiatan	waktu pelaksanaan	
	2. Jumlah Dokumen Hasil Paket Sebaran Kegiatan APBD	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	3. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN)	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	1 Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	2 Jumlah Dokumen Hasil rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	4. Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah dari 33 PD	100	100	Kendala ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari waktu pelaksanaan	Sesuai Target
	5. Jumlah Dokumen Hasil dan evaluasi pelaporan	100	100	Kendala ketersediaan anggaran	Pengajuan kegiatan harus lebih awal dari	Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	pelaksanaan Pembangunan daerah dan wilayah			dengan waktu pelaksanaan kegiatan	waktu pelaksanaan	

Cakupan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Cakupan kegiatan Tahun 2024

Kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi
	2	3	4	5
	Meningkatnya efektivitas koordinasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro)	100	100
		Persentase cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi dengan baik	100	100

	Meningkatnya pembinaan , monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100	100
		Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100	100
	Meningkatnya koordinasi, monitoring, dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administrasi yang tertib	Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah yang tertib	100	100
		Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Wilayah yang tertib	100	100

Capaian Sasaran 1 **Terlaksanannya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA** tahun 2024 mencapai 100%,

Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro Tahun 2024 adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ruang Lingkup

1. Kepala Dinas Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPID
2. Forkopinda Provinsi NTT
3. Kepala BI
4. Kepala BPS
5. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTT
6. Manajer Pelindo III Pelabuhan Tenau kupang
7. Manajer Angkasa Pura II Eltari kupang
8. Pasar Kasih Naikoten

9. Pasar Oeba
10. Pasar Oebobo
11. Gudang Bulong
12. Gudang Distributor Komoditas Pangan
13. Masyarakat
14. Konsumen
15. Pertamina
16. Kabupaten/ Kota
17. Pemda TTS
18. Bank NTT
19. Bank BRI
20. Anggota Kelompok sentra Madu Mutis
21. Perangkat Daerah Provinsi Undana
22. Anggota Pokja HHBK Provinsi NTT

b) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Faktor Pendukung dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya HLM TPID, 4 kali, untuk 30 orang, Lokasi Kota Kupang, 1. RATEK TPID, 2 kali, untuk 30 Orang Lokasi Kota Kupang 2. Sidak Pasar, 2 kali, untuk 30 orang Lokasi Kota Kupang 3. Terlaksananya Rapat Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMI, 1 kali, untuk 60 orang Lokasi Kota Kupang 4. Forum Grup Diskusi (FGD), 4 kali, untuk 30 org, Lokasi Kota Kupang, 5. Rapat Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang 6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA lokasi Kab. Sumba Barat Daya ,Kab. Ende, Kab. Ngada, KAB. Malaka 7. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA (Kab.Malaka,Kab. Ende,Kab. Ngada,Kab. Malaka). |
|-----------------------------|--|

Penghambat

1. Faktor Pendukung

1. Adanya Koordinasi yang baik dari lintas Sektor dan Dinas Teknis dalam mendukung kegiatan Makro ,Mikro dan SDA
2. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan (Makro, Mikro ,SDA);

3. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2. Faktor Penghambat

1. Kecenderungan Perangkat daerah lambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang diminta
2. Terdapat beberapa kesepakatan bersama yang belum ada tindak lanjutnya

Capaian Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik dan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD **Tahun 2024** adalah 75%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup

1. Direktur Utama PT. JAMKRIDA
2. Direktur Utama PT Flobamor
3. Direktur Utama PT Kawasan Industri Bolok
4. Direktur Utama PT BPD NTT (Bank NTT)Direktur Eksekutif PERPAMSI Pusat
5. Pakar Ekonomi Politeknik Negeri Kupang
6. Walikota Kupang
7. Kadis Kesehatan, Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi NTT
8. Direktur BLUD RSUD Prof Dr. W.Z Johannes Kupang provinsi NTT
9. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
10. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
11. Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT
12. Kepala BLUD SPAM Provinsi NTT
13. Direktur BLUD RSJ Naimata Kupang

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk:

1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1x) Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi;
2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok Kab Manggarai, Kab Lembata, Kab.Alor;

		3. Terlaksananya pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT (PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok);
		4. Terlaksananya Rapat sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum;
Hasil Yang Dicapai		5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penetapan SK Gubernur Penetapan kegiatan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di BUMD dan Kab/Kota Se-Provinsi NTT (Lok. Flotim,Sumba Timur,Sikka, Rote, TTS, BLUD yang Ngada, Belu);
		6. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi berkinerja kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Lembata Tanggal 29 April baik sesuai dengan 2024, Flores Timur Tanggal 2 Mei 2024, Sumba Tengah Tanggal 3 Laporan September 2024, Sumba Barat Daya Tanggal 5 September 2024, Kabupaten Alor Tanggal 14 November 2024)

Akuntabilitas keuangan menghasilkan 4 BUMD yang berkinerja Baik dan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Menghasilkan 8 Dokumen dan 1 SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Kab/Kota Se-Provinsi NTT.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan BUMD menjadikan BUMD yang berkinerja Baik
- Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2. Faktor Penghambat

- Kurang Efektif dan Efesien dalam pembinaan dan Manajemen pengelolaan BUMD
- Belum adanya tenaga professional dalam menganalisis Laporan keuangan dari BUMD
- Terdapat beberapa kesepakatan bersama yang belum ada tindak lanjutnya

Capaian Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib Tahun 2023 adalah

100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup

1. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
2. UPT Pusat , Balai -Balai Kementerian yang ada di Provinsi NTT
3. Pemerintah Kabupaten Kota Se -NTT

b. Pelaksanaan Kegiatan

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan (APBD);
2. Paket sebaran kegiatan APBD;
3. Terlaksananya rapat evauasi pelaksanaan pembangunan (APBN); dilaksanakan 2 x dalam setahun lokasi di kota Kupang dan Kab Kupang
4. Terlaksananya monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dae Kab/Kota; (Lokasi Kota Kupang ,Kab. Kupang Kab. Ngada ,kab Sikka TTS,Kab TTU
5. Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaks pembangunan wilayah; yang dilaksanakan 2 Kali dalam setahun dengan L Kota Kupang, Kab. TTS
6. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyua pelaporan pelaksanaan daerah;
7. Terlaksananya Monev pelaporan pelaksanaan PD dan wilayah.

Capaian Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib Tahun 2023 menghasilkan 21 Dokumen

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Koordinasi yang baik dari 33 OPD dalam mendukung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah

- b. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah;
- c. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2. Faktor Penghambat

- a. Kecenderungan Perangkat daerah lambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan terkait lapaoran Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang diminta

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Komposisi anggaran yang dialokasikan dalam DPA-DPPA Tahun Anggaran 2024 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan Alokasi anggaran pada setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	BIRO PEREKONOMI AN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N	1.558.415.064	1.364.773.689	87,57	193.641.375	12,42

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	385.079.640	378.161.319	98,20	6.918.321	1,80
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.139.000	48.010.700	97,70	1.128.300	2,30
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.568.000	161.557.179	99,99	10.821.000	6,70
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.585.040	95.039.120	99,49	5.545.920	5,51
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	73.787.600	73.554.320	99,68	223.280	0,31
06.	PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N	959.600.000	773.715.990	80,63	185.884.010	19,37
06.06.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	408.000.000	332.795.902	81,57	75.204.098	18,43

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
06.06.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	382.900.000	321.336.502	83.92	61.563.498	16,08
06.06.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	25.100.000	11.459.400	45.65	13.640.600	54.35
06.06.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	109.100.000	91.242.480	83.63	17.857.520	16.37
06.06.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	69.100.000	54.396.940	78.72	14.703.060	21.28
06.06.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000	36.845.540	92.11	3.154.460	7.89
06.06.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	442.500.000	349.677.608	79.02	92.822.392	20.98
06.06.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	356.000.000	279.157.188	78.41	76.842.812	21.59

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Pengdirian BUMD					
06.06.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengdirian BLUD	86.500.000	70.520.420	81.53	15.979.580	18.47
08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	213.735.424	212.896.380	99.61	839.044	0,39
08.08.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	187.160.000	186.664.480	99.74	495.520	0,26
08.08.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99.000.000	98.983.240	99.98	16.760	0,01
08.08.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.660.000	39.633.800	99.93	26.200	0,06
08.08.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	48.500.000	48.047.440	99.07	452.560	0,93
08.08.02	Pelaporan Pelaksanaan	26.575.424	26.231.900	98.71	343.542	1,29

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Pembangunan Daerah					
08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	26.575.424	26.231.900	98.71	343.542	1,29

BAB IV

KEPEGAWAIAN

4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi NTT Nomor 0102) dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaa Birokrasi Pasal 1 poin 16 dan 17, maka susunan struktur organisasi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri atas:



Struktur organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
 - 1.1 Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 - 1.2 Kepala Sub Tata Usaha.
2. Analisis Kebijakan Ahli Madya
3. Analisis Kebijakan Ahli Muda
4. Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Pelaksana

Total jabatan struktural dan fungsional yang terisi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebanyak 6 (Enam), terdiri dari 2 (dua) jabatan struktural dan 3 (Tiga) jabatan fungsional dan 1 (Satu) Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II : - orang
- Eselon IV : 1 orang
- Analis Ahli Madya : 3 orang
- Analis Ahli Muda : 6 orang
- Pranata Komputer Ahli pertama : 4 orang
- Pelaksana : 22 orang

DATA UMUM

1. Data SKPD

- a. Nama : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT
- b. Alamat : Jln. Raya El Tari Nomor 52
- c. No. Telp : (0380) 820460
2. Dasar Pembentukan Unit : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
kerja Nomor : Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
3. Kepala Kantor :
- a. Nama : Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
- b. N I P : 197004271990031005
- c. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I / (IV/b)
- d. Jabatan Struktural : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
- e. SK. Pengangkatan : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
sebagai Kepala Kantor Nomor : 816.2.1/60/BKD.3.2
Tanggal : 14 November 2024

DATA – DATA KEPEGAWAIAN

Data Formasi Pegawai :

- a. Kekuatan Pegawai (Bazzeting) : 38 orang

No	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	36	15	21
2	CPNS	0	0	0
3	Tenaga Kontrak	2	1	1
Jumlah		38	16	22

- b. Klasifikasi PNS/CPNS

1. Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan :

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	6	4	2
2	Golongan III	26	8	18
3	Golongan II	4	3	1
4	Golongan I	0	0	0
Jumlah		36	15	21

2. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional :

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-A	0	0	0
2	Pejabat Eselon III-A	0	0	0
3	Pejabat Eselon IV-A	1	0	1
4	Pejabat Fungsional	13	5	8
Jumlah		14	5	9

3. Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	0	0	0
2	Magister (S-2)	8	6	2
3	Sarjana (S-1)	21	5	16
4	Diploma III (D-III)	0	0	0
5	SLTA/SMK	7	4	3
6	SLTP	0	0	0
7	SD	0	0	0
Jumlah		36	15	21

4. Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas

No	Fungsi	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Satpam	0	0	0
2	Cleaning service	0	0	0
3	Sopir	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Jumlah		2	1	1

Data Karis/Karsu/Karpeg/DP3 :

a. Jumlah Status PNS :

- Jumlah yang telah menikah : 31 orang
- Jumlah yang belum menikah : 5 orang

b. Jumlah Karis/Karsu PNS :

- Jumlah yang telah memiliki Karis : 13 orang
- Jumlah yang telah memiliki Karsu : 16 orang
- Jumlah belum memiliki Karis : 2 orang

- Jumlah belum memiliki Karsu : - orang
- c. Jumlah Karpeg PNS :
- Jumlah yang telah memiliki Karpeg : 36 orang
 - Jumlah yang belum memiliki Karpeg : - orang
- d. Jumlah PNS yang belum memasukkan DP3 / SKP : -

Data Kenaikan Pangkat/Golongan :

- a. Jumlah PNS yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat :
- Golongan IV : - orang
 - Golongan III : 1 orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan I : - orang
- b. Jumlah PNS yang telah diproses kenaikan pangkat :
- Golongan IV : - orang
 - Golongan III : 1 orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan I : - orang
- c. Jumlah PNS yang belum diproses kenaikan pangkat :
- Golongan IV : - orang
 - Golongan III : - orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan I : - orang

Data Kenaikan Gaji Berkala :

- a. Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan gaji berkala :
- Golongan IV : 2 orang
 - Golongan III : 13 orang
 - Golongan II : 4 orang
 - Golongan I : - orang
- b. Jumlah PNS yang telah diproses kenaikan gaji berkala :
- Golongan IV : 2 orang

Golongan III : 13 orang
Golongan II : 4 orang
Golongan I : - orang

c. Jumlah PNS yang belum diproses kenaikan gaji berkala :

Golongan IV : - orang
Golongan III : - orang
Golongan II : - orang
Golongan I : - orang

Sumpah PNS :

- a. Jumlah PNS yang telah mengangkat sumpah PNS : -
b. Jumlah PNS yang belum mengangkat sumpah PNS : -

Data Pensiun/MPP :

a. Jumlah PNS yang telah pensiun :

Golongan IV : - orang
Golongan III : 1 orang
Golongan II : - orang
Golongan I : - orang

b. Jumlah PNS yang seharusnya pensiun namun belum diproses pensiunnya :

Golongan IV : - orang
Golongan III : - orang
Golongan II : - orang
Golongan I : - orang

c. Jumlah PNS yang telah MPP

Golongan IV : - orang
Golongan III : - orang
Golongan II : - orang
Golongan I : - orang

Diklat Kepemimpinan/Prajabatan :

- a. Jumlah Pejabat yang telah menduduki jabatan namun belum mengikuti Diklat

PIM:

Eselon IIa : -

Eselon IIIa : -

Eselon IVa : -

- b. Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan :

Golongan III : -

Golongan II : -

Golongan I : -

- c. Jumlah CPNS yang belum mengikuti Diklat Prajabatan :

Golongan III : -

Golongan II : -

Golongan I : -

Ujian Dinas :

- a. Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk ujian dinas : -

Golongan III : -

Golongan II : -

- b. Jumlah PNS yang telah mengikuti ujian Dinas : -

Golongan III : -

Golongan II : -

- c. Jumlah PNS yang belum mengikuti ujian dinas :

Golongan III : -

Golongan II : -

Tanda Kehormatan/Satya Lencana :

- a. Jumlah PNS yang telah mencapai masa kerja 30 Tahun ke atas : 7 orang

- Jumlah PNS yang telah menerima tanda jasa : - orang

- Jumlah PNS yang belum menerima tanda jasa : 6 orang
- b. Jumlah PNS yang telah mencapai masa kerja 20 tahun ke atas : 16 orang
 - Jumlah PNS yang telah menerima tanda jasa : 6 orang
 - Jumlah PNS yang belum menerima tanda jasa : 10 orang
- c. Jumlah PNS yang telah mencapai masa kerja 10 tahun ke atas : 30 orang
 - Jumlah PNS yang telah menerima tanda jasa : 20 orang
 - Jumlah PNS yang belum menerima tanda jasa : 10 orang

LAPORAN KEPEGAWAIAN BERKALA SEMESTER I

UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
: SETDA PROV NTT
PERIODE *) : JANUARI - JUNI
TAHUN : 2024

I. PNS YANG MENERIMA SK PENGANGKATAN DARI CPNS KE PNS

NO	NIP/ NAMA	TMT PNS	JABATAN	KET.
-	-	-	-	-

II. PNS YANG SELESAI MENGIKUTI DIKLAT

NO	NIP/ NAMA	NAMA DIKLAT/ TANGGAL	LAMA (JAM)	JENIS DIKLAT (*)	PENYELENGGARA/ LOKASI	KET.
1.	19970214 202202 2 001 / Meysiliani S. Bata, S.Kom	Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-1 Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 / 19 s.d 23 Februari 2024	18	Teknis (T)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Jln. Feter Foenay, BTN Kolhua - Kecamatan Maulafa - Kota Kupang	LULUS

*)Jenis diklat : Struktural (S), Fungsional (F), Teknis (T).

III. PNS YANG MENERIMA SURAT IJIN BELAJAR (IB) DAN TUGAS BELAJAR (TB)

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	NOMOR SURAT/ TGL. SURAT/ TGL. AKHIR BERLAKU	TK.PENDIDIKAN/ JURUSAN	NAMA SEKOLAH (UNIVERSITAS)	KET.
-	-	-	-	-	-	-

*) Jenis : Ijin Belajar (**IB**), Tugas Belajar (**TB**)

***) TK. Pendidikan : **S3, S2, S1, D4, D3, D2, D1, SMA, SMP, SD.**

IV. PNS YANG TELAH LULUS DARI BELAJAR

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	NOMOR SURAT(IB,TB)/ TANGGAL	TK. PENDIDIKAN	JURUSAN/ THN LULUS	NAMA SEKOLAH (UNIVERSITAS)	KET.
-	-	-	-	-	-	-	-

*) Jenis: Ijin Belajar (**IB**), Tugas Belajar (**TB**) dan Ijin Lainnya (**IL**)

V. PNS YANG TELAH MUTASI KELUAR

NO	NIP/ NAMA	NOMOR SURAT MUTASI/ TANGGAL	INSTANSI TUJUAN	KET.
1.	19780401 201001 2 005 / Maria Filomena Langoday, SE.	824.3/I/1/24/24-ND / 01 Februari 2024	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Nagekeo	-
2.	19660814 198803 1 018 / DR. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si.	816.2.1/20/BKD.3.2 / 26 Maret 2024	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	-

VI. PNS YANG MENERIMA DOKUMEN KEPEGAWAIAN

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	NOMOR DOKUMEN/ TANGGAL	KET.
-	-	-	-	-

*) KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, KPE

VII. PNS YANG MENERIMA SK PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

NO	NIP/ NAMA	KARYA SATYA (TAHUN)	NOMOR SURAT PENGHARGAAN/ TGL. SURAT	KET.
-	-	-	-	-

*) KARYA SATYA 10, 20, 30 TAHUN

VIII. PNS YANG MENERIMA SK PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERTENTU (MUTASI JABATAN)

NO	NIP/ NAMA	NOMOR SK/ TGL. SK/ TMT JABATAN	JENIS *)	NAMA JABATAN	KET. **)
1.	19660814 198803 1 018 / DR. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si.	100.2.1.3-6103 / 10 November 2023 / 14 November 2023	STR	Pelaksana Jabatan Bupati Sumba Tengah	Pelaksana Jabatan (Pj)
2.	19700427 199003 1 005 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM.	816.2.1/60/BKD.3.2 / 14 November 2023 / 14 November 2023 s/d 14 Februari 2024	STR	Pelaksana Tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Pelaksana Tugas (Plt)
3.	19700427 199003 1 005 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM.	816.2.1/13/BKD.3.2 / 15 Februari 2024 / 15 Februari 2024 s/d 15 Mei 2024	STR	Pelaksana Tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Pelaksana Tugas (Plt)

4.	19700427 199003 1 005 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM.	816.2.1/104/BKD.3.2 / 2 April 2024/ 2 April 2024 s/d 2 Juli 2024	STR	Pelaksana Tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Pelaksana Tugas (Plt)
----	--	---	-----	---	-----------------------------

*) STRUKTURAL (**STR**), FUNGSIONAL TERTENTU (**JFT**), STAF FUNGSIONAL UMUM (**JFU**) **) Contoh keterangan: Tugas Tambahan, Pelaksana Jabatan (Pj.) dll.

IX. PNS YANG MENERIMA SK MUTASI UNIT KERJA

NO	NIP/ NAMA	NOMOR SK/ TGL. SK/ TMT	UNIT LAMA	UNIT KERJA BARU	JABATAN	KET.
1.	19780401 201001 2 005 / Maria Filomena Langoday, SE.	824.3/I/1/24/24-ND / 18 Januari 2024 / 01 Februari 2024	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Nagekeo	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-
2.	19660814 198803 1 018 / DR. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si.	816.2.1/20/BKD.3.2 / 26 Maret 2024 / 27 Maret 2024	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	-

X. PNS YANG MENERIMA SK KENAIKAN PANGKAT

NO	NIP/ NAMA	GOL/ RUANG	TMT PANGKAT	MASA KERJA		NO SK/ TGL. SK/ PEJABAT PENETAP	KET.
				THN	BLN		
-	-	-	-	-	-	-	-

XI. PNS YANG MENERIMA SK KENAIKAN GAJI BERKALA

NO	NIP/ NAMA	GOL/ RUANG	TMT BERKALA	MASA KERJA		NO SK/ TGL. SK/ PEJABAT PENETAP	KET.
				THN	BLN		
1.	19780401 201001 2 005 / Maria Filomena Langoday, SE.	Penata Tk. I (III/d)	01 Januari 2024	14	00	822.3/ 830 /PAP1.1 / 09 November 2023 / Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si	
2.	19810619 201001 1 013 / Ferdinand B. Manbait, SE., M.Ec.Dev.	Penata Tk. I (III/d)	01 Januari 2024	14	00	822.3/ 829 /PAP1.1 / 09 November 2023 / Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si	
3.	19840613 200801 1 006 / Jonias Ressi, S.M	Penata Muda (III/a)	01 Januari 2024	12	00	822.3/ 831 /PAP1.1 / 09 November 2023 / Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si	
4.	19960715 202202 2001 / Lingkan Ruru Tanan,S.Kom	Penata Muda (III/a)	01 Februari 2024	02	00	822.3/ 921 /PAP1.1 / 07 Desember 2023 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
5.	19970214 202202 2001 / Meysiliani Sidi Bata,S.Kom	Penata Muda (III/a)	01 Februari 2024	02	00	822.3/ 922 /PAP1.1 / 07 Desember 2023 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
6.	19850627 201406 2 001 / Josevina Erlyn Hoinbala	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	01 Februari 2024	17	01	822.2/ 920 /PAP1.1 / 07 Desember 2023 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
7.	19670913 199203 1 009 / Yohanes Nani, S.Pi., M.Si.	Pembina (IV/a)	01 Maret 2024	30	00	800.1.10.3 / 70 / EK1.1 / 26 Januari 2024 /	

NO	NIP/ NAMA	GOL/ RUANG	TMT BERKALA	MASA KERJA		NO SK/ TGL. SK/ PEJABAT PENETAP	KET.
				THN	BLN		
						Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
8.	19690902 199703 1 008 / Rudi Arman Adi, S.Pi.	Penata Tk. I (III/d)	01 Maret 2024	22	00	800.1.10.3 / 35 / EK1.1 / 16 Januari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
9.	19700917 199303 1 008 / Sefri Maurits Tiason Nalle, S.Sos.	Penata Tk. I (III/d)	01 Maret 2024	26	00	800.1.10.3 / 34 / EK1.1 / 16 Januari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
10.	19670601 199103 2 016 / Maria Enggelina Radjapono	Penata Tk. I (III/d)	01 Maret 2024	28	00	800.1.10.3 / 33 / EK1.1 / 16 Januari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
11.	19670812 198903 1 011 / Fidelis Selo	Penata Muda (III/a)	01 Maret 2024	24	00	800.1.10.3 / 70 / EK1.1 / 16 Januari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
12.	19730815 200701 2 022 / Agnes G. Rotuludji, S.Sos.	Penata Muda Tk. I (III/b)	01 April 2024	20	00	800.1.10.3 / 103 / EK1.1 / 05 Februari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
13.	19660316 201406 1 004 / Marthen Talelu	Pengatur (II/c)	01 April 2024	24	00	800.1.10.3 / 105 / EK1.1 / 05 Februari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	
14.	19670202 201406 1 002 / Yosy Kebkole	Pengatur (II/c)	01 April 2024	24	00	800.1.10.3 / 104 / EK1.1 / 05 Februari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	

NO	NIP/ NAMA	GOL/ RUANG	TMT BERKALA	MASA KERJA		NO SK/ TGL. SK/ PEJABAT PENETAP	KET.
				THN	BLN		
15.	19710107 201406 1 003 / Godlief Manus	Pengatur (II/c)	01 April 2024	24	00	800.1.10.3 / 106 / EK1.1 / 05 Februari 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	

XII. PNS YANG MENJALANI CUTI

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	JML HARI	Tgl Mulai-Tgl. Selesai	NO SK/ TGL. SK/ PENETAP	KET.
1.	19840613 200801 1 006 / Jonias Ressi, S.M	Cuti Tahunan	24	18 Maret 2024 - 30 April 2024	- / 26 Februari 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	-
2.	19731201 200312 2 005 / Jeanette D. Deborah Thei, S.Pt.	Cuti Tahunan	6	21 Maret 2024 - 28 Maret 2024	- / 01 Maret 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	-
3.	19690902 199703 1 008 / Rudi Arman Adi, S.Pi.	Cuti Tahunan	24	29 April 2024 - 07 Juni 2024	- / 17 April 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	-
4.	19960715 202202 2001 / Lingkan Ruru Tanan,S.Kom	Cuti Alasan Penting	31	14 Juni 2024 - 14 Juli 2024	- / 13 Juni 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	-
5.	19850627 201406 2 001 / Josevina Erlyn Hoinbala	Cuti Tahunan	6	25 Juni 2024 - 02 Juli 2024	- / 14 Juni 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	-

*) Jenis : Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, Cuti Luar Tanggungan Negara

XIII. PNS YANG MENERIMA SK PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	NO SK/ TGL. SK/ TMT	KET.
1.	19660316 201406 1 004 / Marthen Talelu	Pensiun Usia	00131/25300/AV/03/24 / 26 Maret 2024 / 01 April 2024	-

*) Jenis : Pensiun Usia, Pensiun Dini, Pengunduran Diri, Diberhentikan

XIV. PNS YANG MENINGGAL DUNIA

NO	NIP/ NAMA	TANGGAL MENINGGAL	TMT PENSIUN	KET.
-	-	-	-	-

XV. PNS YANG MENERIMA SK PENINDAKAN PELANGGARAN DISIPLIN

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	No. SK/ Tgl. SK/ Tgl. Mulai - Tgl. Selesai	KET.
-	-	-	-	-

*) Jenis : Berat, Sedang Ringan

XVI. PNS YANG TIDAK MASUK LEBIH DARI 1(SATU) BULAN BERTURUT-TURUT

NO	NIP/ NAMA	JABATAN	Periode Absen	KET.
			Tgl. Mulai - Tgl. Masuk	
-	-	-	-	-

LAPORAN KEPEGAWAIAN BERKALA SEMESTER II

UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
: SETDA PROV NTT
PERIODE *) : SEMESTER II (JULI – DESEMBER)
TAHUN : 2024

I. PNS YANG MENERIMA SK PENGANGKATAN DARI CPNS KE PNS

NO	NIP/ NAMA	TMT PNS	JABATAN	KETERANGAN
-	-	-	-	-

II. PNS YANG SELESAI MENGIKUTI DIKLAT

NO	NIP/ NAMA	NAMA DIKLAT/ TANGGAL	LAMA (JAM)	JENIS DIKLAT *)	PENYELENGGARA/ LOKASI	KET.
-	-	-	-	-	-	-

*)Jenis diklat : Struktural (**S**), Fungsional (**F**), Teknis (**T**).

III. PNS YANG MENERIMA SURAT IJIN BELAJAR (IB) DAN TUGAS BELAJAR (TB)

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	NOMOR SURAT/ TGL. SURAT/ TGL. AKHIR BERLAKU	TK.PENDIDIKAN/ JURUSAN	NAMA SEKOLAH (UNIVERSITAS)	KET.
-	-	-	-	-	-	-

*) Jenis : Ijin Belajar (**IB**), Tugas Belajar (**TB**)

***) TK. Pendidikan : **S3, S2, S1, D4, D3, D2, D1, SMA, SMP, SD.**

IV. PNS YANG TELAH LULUS DARI BELAJAR

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	NOMOR SURAT(IB,TB)/ TANGGAL	TK. PENDIDIKAN	JURUSAN/ THN LULUS	NAMA SEKOLAH (UNIVERSITAS)	KET.
-	-	-	-	-	-	-	-

*) Jenis: Ijin Belajar (**IB**), Tugas Belajar (**TB**) dan Ijin Lainnya (**IL**)

V. PNS YANG TELAH MUTASI KELUAR

NO	NIP/ NAMA	NOMOR SURAT MUTASI/ TANGGAL	INSTANSI TUJUAN	KETERANGAN
-	-	-	-	-

VI. PNS YANG MENERIMA DOKUMEN KEPEGAWAIAN

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	NOMOR DOKUMEN/ TANGGAL	KETERANGAN
-	-	-	-	-

*) *KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, KPE*

VII. PNS YANG MENERIMA SK PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

NO	NIP/ NAMA	KARYA SATYA (TAHUN)	NOMOR SURAT PENGHARGAAN/ TGL. SURAT	KETERANGAN
1.	197009171993031008/ Sefri M. T. Nalle, S.Sos	20	37669/4/2024	

*) *KARYA SATYA 10, 20, 30 TAHUN*

VIII. PNS YANG MENERIMA SK PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERTENTU (MUTASI JABATAN)

NO	NIP/ NAMA	NOMOR SK/ TGL. SK/ TMT JABATAN	JENIS *)	NAMA JABATAN	KET. **)
-	-	-	-	-	-

*) *STRUKTURAL (STR), FUNGSIONAL TERTENTU (JFT), STAF FUNGSIONAL UMUM (JFU)*

***) *Contoh keterangan: Tugas Tambahan, Pelaksana Jabatan (Pj.) dll.*

IX. PNS YANG MENERIMA SK MUTASI UNIT KERJA

NO	NIP/ NAMA	NOMOR SK/ TGL. SK/ TMT	UNIT LAMA	UNIT KERJA BARU	JABATAN	KETERANGAN
-	-	-	-	-	-	-

X. PNS YANG MENERIMA SK KENAIKAN PANGKAT

NO	NIP/ NAMA	GOL/ RUANG	TMT PANGKAT	MASA KERJA		NO SK/ TGL. SK/ PEJABAT PENETAP	KET.
				THN	BLN		
1.	197308152007012022/ / Agnes G. Rotuludji, S.Sos	Penata / (III/c)	01/10/2024	20	06	823.4/X/159/BKD4.1 / 30 September 2022 / Josef Adreanus Nae Soi	

XI. PNS YANG MENERIMA SK KENAIKAN GAJI BERKALA

NO	NIP/ NAMA	GOL/ RUANG	TMT BERKALA	MASA KERJA		NO SK/ TGL. SK/ PENETAP	KET.
				THN	BLN		
1.	197607092006041019 / Paulus H. Safrodan, SH., MH	Penata / (III/c)	01/10/2024	14	00	800.1.10.3/861/EK1.1 / 17 September 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	-
2.	197709042000122002/ Ipolita C. Ngare, SE., MM	Pembina / (IV/a)	01/12/2024	24	00	800.1.10.3/940/EK1.1 / 09 Oktober 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	-
3.	197305061993122001/ Meriyana, S.Sos	Penata Tingkat I / (III/d)	01/12/2024	26	00	800.1.10.3/939/EK1.1 / 09 Oktober 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	-

NO	NIP/ NAMA	GOL/ RUANG	TMT BERKALA	MASA KERJA		NO SK/ TGL. SK/ PENETAP	KET.
				THN	BLN		
4.	198806062020122006/ Yohana Fransisca, S.Kom	Penata Muda / (III/a)	01/12/2024	04	00	800.1.10.3/941/EK1.1 / 09 Oktober 2024 / Drs. Alexander B. Koroh, MPM	-

XII. PNS YANG MENJALANI CUTI

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	JML HARI	Tgl Mulai-Tgl. Selesai	NO SK/ TGL. SK/ PENETAP	KET.
1.	197806262010012006 / Yohanita U. Kabelen, SE	Cuti Tahunan	8	04 Juli 2024 - 16 Juli 2024	- / 19 Juni 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	-
2.	196910271999031003/ Ernes D. Hamel, S.Pi., M.Si	Cuti Alasan Penting	1 bulan	05 Juli 2024 - 05 Agustus 2024	- / 03 Juli 2024 / Yosef Rasi, S.Sos, M.Si	-
3.	199702142022022001 / Meysiliani S. Bata, S.Kom	Cuti Tahunan	6	08 Juli 2024 - 15 Juli 2024	- / 21 Juni 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
4.	197709042000122002 / Ipolita Claura Ngare, SE., MM	Cuti Tahunan	10	22 Juli 2024 - 02 Agustus 2024	- / 15 Juli 2024 / Yosef Rasi, S.Sos, M.Si	
5.	196508081993032011 / Patrisia A. Dhengi Wea, SE	Cuti Tahunan	6	01 Agustus 2024 - 08 Agustus 2024	- / 23 Juli 2024 / Yosef Rasi, S.Sos, M.Si	
6.	196708121989031011 / Fidelis Selo	Cuti Tahunan	12	06 Agustus 2024 - 21 Agustus 2024	- / 30 Juli 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
7.	197511162014062005 / Maria Imelda Surya, SE	Cuti Tahunan	18	12 Agustus 2024 - 04 September 2024	- / 02 Agustus 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	

NO	NIP/ NAMA	JENIS)	JML HARI	Tgl Mulai-Tgl. Selesai	NO SK/ TGL. SK/ PENETAP	KET.
8.	196909021997031008 / Rudi Arman Adi, S.Pi	Cuti Sakit	2 bulan	01 September 2024 - 31 Oktober 2024	- / 11 September 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
9.	197305061993122001 / Meriyana, S.Sos	Cuti Alasan Penting	1 bulan	10 September 2024 – 10 Oktober 2024	- / 09 September 2024 / Yosef Rasi, S.Sos, M.Si	
10.	198106192010011013 / Ferdinand B. Manbait, SE., M.Ec.Dev	Cuti Tahunan	6	23 September 2024 - 30 September 2024	- / 29 Agustus 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
11.	196702022014061002 / Yosy Kebkole	Cuti Tahunan	12	26 September 2024 - 11 Oktober 2024	- / 18 September 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
12.	197305061993122001 / Meriyana, S.Sos	Cuti Tahunan	12	14 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024	- / 11 Oktober 2024/ Yosef Rasi, S.Sos, M.Si	
13.	196706011991032016 / Maria Engelina Radjapono	Cuti Tahunan	12	14 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024	- / 01 Oktober 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
14.	197709232000122003 / Neneng W. Tufan, SE	Cuti Tahunan	6	15 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024	- / 07 Oktober 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
15.	196904031992032017 / Martha Moni Balu, SE	Cuti Tahunan	6	15 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024	- / 07 Oktober 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	
16.	198804042019031002 / Wilfridus Franspet. Penga. Wene, S.Kom	Cuti Tahunan	24	01 November 2024 - 04 Desember 2024	- / 23 Oktober 2024 / Jusuf Elisa Otemusu, ST	

*) Jenis : Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, Cuti Luar Tanggungan Negara

XIII. PNS YANG MENERIMA SK PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	TMT	KET.
-	-	-	-	-

**) Jenis : Pensiun Usia, Pensiun Dini, Pengunduran Diri, Diberhentikan*

XIV. PNS YANG MENINGGAL DUNIA

NO	NIP/ NAMA	TANGGAL MENINGGAL	TMT PENSIUN	KET.
-	-	-	-	-

XV. PNS YANG MENERIMA SK PENINDAKAN PELANGGARAN DISIPLIN

NO	NIP/ NAMA	JENIS *)	No. SK/ Tgl. SK/ Tgl. Mulai - Tgl. Selesai	KET.
-	-	-	-	-

**) Jenis : Berat, Sedang Ringan*

XVI. PNS YANG TIDAK MASUK LEBIH DARI 1(SATU) BULAN BERTURUT-TURUT

NO	NIP/ NAMA	JABATAN	Periode Absen	KET.
			Tgl. Mulai - Tgl. Masuk	
-	-	-	-	-

1. Dukungan sarana dan prasarana kantor

Kondisi dan jenis sarana prasarana juga berpengaruh terhadap operasional kegiatan organisasi, meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan sarana transportasi. Secara umum keadaan sarana dan prasarana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilihat pada buku inventarisasi barang yang didalamnya terdapat kartu inventarisasi barang dan rekapitulasi aset tetap

Secara umum dapat di sampaikan sebagai berikut :

NO	SPESIFIKASI BARANG		SATUAN	TAHUN	KONDISI (B/KB/R/RB)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK / TYPE						
1	Laptop	Toshiba	Buah	2013	B	1	7.391.000	7.391.000
		Toshiba	Buah	2013	B	2	9.000.000	18.000.000
		Acer	Buah	2013	B	1	4.400.000	4.400.000
			Buah	2018	B	4	9.750.000	39.000.000
			Buah	2019	B	1	7.500.000	7.500.000
		Asus	Buah	2022	B	2	8.855.000	17.710.000
2	Komputer PC	Samsung	Buah	2013	B	1	7.000.000	7.000.000
		Acer	Buah	2013	B	5	4.400.000	22.000.000
			Buah	2014	B	3	6.000.000	18.000.000
			Buah	2014	B	1	8.000.000	8.000.000
			Buah	2015	B	2	7.500.000	15.000.000
			Buah	2015	B	4	8.500.000	34.000.000
			Buah	2017	B	1	7.500.000	7.500.000
		Hp all in one	Buah	2018	B	1	10.000.000	10.000.000
		Asus	Buah	2017	B	2	7.500.000	15.000.000
		Lenovo	Buah	2018	B	1	7.250.000	7.250.000
			Buah	2020	B	6	8.000.000	48.000.000
3	Printer	Canon	Buah	2013	B	2	1.000.000	2.000.000
			Buah	2014	B	4	1.000.000	4.000.000
		Scan Pixma	Buah	2015	B	1	2.500.000	2.500.000
		Dot Matrix	Buah	2015	B	2	8.500.000	17.000.000
		Canon	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000

NO	SPESIFIKASI BARANG		SATUAN	TAHUN	KONDISI (B/KB/R/RB)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
	NAMA/JENIS BARANG	MEREK / TYPE						
		Scan Pixma	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000
		Epson L380	Buah	2017	B	1	3.500.000	3.500.000
			Buah	2018	B	4	3.400.000	13.600.000
		Epson L310	Buah	2020	B	6	4.000.000	24.000.000
4	UPS	Ersis	Buah	2013	R	1	880.000	880.000
		ICA	Buah	2018	B	3	1.700.000	5.100.000
5	Notebook	Toshiba	Buah	2013	B	2	3.250.000	6.500.000
6	Infocus	Proyektor NEC	Buah	2013	B	1	5.000.000	5.000.000
		Proyektor Banq	Buah	2014	B	1	8.000.000	8.000.000
		Proyektor Glite	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000
		LCD Proyektor Epson EB-S400	Buah	2017	B	1	6.000.000	6.000.000
		Tipe Segi empat	Buah	2018	B	1	850.000	850.000
7	Sound System						25.000.000	25.000.000
8	Filling Kabinet		Buah	2015	B	1	7.500.000	7.500.000
				2018	B	2	2.366.700	4.733.400
9	Kendaraan	Rush DH 936 AW	Unit (KIBOLOG)	2014	B	1	228.685.000	228.685.000
		Rush DH 53 WA	Unit	2015	B	1	250.100.000	250.100.000

BAB V

PENGUMPULAN DATA SKM

5.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah tim pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

5.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan scan barcode yang disebarakan oleh pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat, khususnya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terkait pelayanan tidak dikenakan biaya.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

5.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu saat jam kerja. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

5.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan selama 1 (satu) tahun, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

5.5 Jumlah Responden

Populasi penerima layanan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu dari bulan Januari sampai Desember 2024 adalah sebanyak 28 orang.

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 28 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTI K	INDIKATOR	JUMLA H	PERSENTAS E
1	JENIS KELAMIN	LAKI	20	71,42 %
		PEREMPUAN	8	28,58 %
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	-
		SLTP	0	-
		SLTA	0	-
		DIII	0	-
		SI	23	17,86 %
		S2	5	82,14%
3	PEKERJAAN	PNS	13	46,42 %
		POLRI	1	3,58 %
		TNI	0	-
		SWASTA	2	7,14 %
		WIRUSAHA	0	-
		LAINNYA	12	42,86 %

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	99	100	96	108	99	100	102	95	110

Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,18 (A atau Sangat Baik)								

ANALISIS HASIL SKM

Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan mendapat nilai terendah yaitu 90,18. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu peningkatan kualitas pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan di tahun mendatang.

**TABULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BIRO PEREKONOMAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

Jenis Layanan : Koordinasi, Konsultasi
 Jumlah Populasi : 28 Masukan Nilai Populasi (Jumlah penerima Layanan)
 Jumlah Target Responden : 28 Target jumlah responden berdasarkan total penetapan jumlah responden PermenPAN RB 14 Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT PER-UNSUR PELAYANAN									Keluhan/Saran Perbaikan
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	Laki-laki	36	D4/S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	Laki-laki	48	D4/S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Laki-laki	45	D4/S1	PNS	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
4	Laki-laki	21	D4/S1	Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga kedepan sukses selalu
5	Perempuan	45	S2	PNS	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Terima kasih atas pelayanan yang diberikan
6	Laki-laki	35	D4/S1	PNS	2	3	3	4	3	3	3	3	4	
7	Laki-laki	50	D4/S1	PNS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Dipertahankan
8	Laki-laki	48	D4/S1	PNS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Semakin ditingkatkan
9	Perempuan	42	D4/S1	PNS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Dipertahankan
10	Laki-laki	42	D4/S1	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahankan kinerja yang telah berjalan selama ini
11	Laki-laki	42	D4/S1	PNS	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Pertahankan kinerja yang telah berjalan
12	Perempuan	35	S2	Dosen	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
13	Laki-laki	37	D4/S1	PNS	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
14	Perempuan	21	D4/S1	Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	Laki-laki	45	D4/S1	Polri	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
16	Laki-laki	50	D4/S1	PNS	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
17	Laki-laki	21	D4/S1	Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	Laki-laki	21	D4/S1	Mahasiswa	4	4	3	3	3	4	4	4	4	Sukses selalu kedepannya
19	Laki-laki	21	D4/S1	Mahasiswa	3	3	3	4	3	4	4	3	4	Semoga lebih baik lagi kedepannya
20	Perempuan	21	D4/S1	Mahasiswa	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
21	Perempuan	22	D4/S1	Mahasiswa	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
22	Laki-laki	37	D4/S1	BUMD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat baik
23	Laki-laki	42	S2	Swasta	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
24	Laki-laki	42	D4/S1	PNS	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
25	Perempuan	35	S2	Dosen	4	4	4	4	3	3	4	3	4	
26	Perempuan	35	S2	Dosen	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
27	Laki-laki	45	D4/S1	Polri	4	3	3	4	4	4	3	3	3	
28	Laki-laki	38	D4/S1	PNS	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
Σ Nilai					99	100	96	108	99	100	102	95	110	
Nilai Rata-Rata					3,536	3,571	3,429	3,857	3,536	3,571	3,643	3,393	3,929	
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0,393	0,397	0,381	0,429	0,393	0,397	0,405	0,377	0,437	3,607
SKM Unit Pelayanan					90,18			SANGAT BAIK						

BAB VI

PENUTUP

Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2024 disusun untuk memberikan penjelasan terkait dengan arah kebijakan dan mengembangkan fungsi dari 3 (tiga) Program pokok beserta 10 kegiatan yang telah di jalankan oleh 3 (tiga) Bagian dalam berbagai kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang telah menghasilkan berbagai output berupa Dokumen, Rekomendasi, Laporan dan Naskah akademik. Selain itu menjalankan berbagai kegiatan dan fasilitasi yang menjadi tanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Kegiatan Perekonomian dan Koordinasi Pembangunan meliputi Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Kegiatan Administrasi Pembangunan meliputi Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD dan APBN) serta Pelaporan.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari Rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, untuk menjadi bahan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya.

Kupang, 22 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,



Drs. Alexander B. Koroh, MPM
Pembina Tingkat 1
NIP 19700427 199003 1 005